

Kajian Asia Tenggara: Antara Narasi, Teori, dan Emansipasi

Achmad Firas Khudi dan Iqra Anugrah

Abstrak

As an academic discipline, modern Southeast Asian Studies (SEA Studies) faces three main challenges. First of all, there is still a huge gap in scholarship and publication between the West-based and Southeast Asia-based SEA Studies. Secondly, SEA Studies is often in a dilemmatic position between the push for generalization of mainstream social sciences and the anti-causality stance of various strands of Postmodernism. Thirdly, in general there is a decline of SEA Studies in the West especially in North America. However, recent developments in SEA Studies, namely a possibility for an emancipatory SEA Studies, the shifting center of gravity for SEA Studies from North America to Asia-Pacific and the expanding higher education sector in Indonesia might present some opportunities for the development of a Southeast Asia-based SEA Studies in the future.

Pendahuluan

Apa kabar Kajian Asia Tenggara (KAT)? Setidaknya semenjak naik daunnya KAT terutama di Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia ke-II (PD II), KAT telah mengalami transformasi dalam arah keilmuan. KAT modern, sebagaimana kajian kawasan yang lain, berawal dari kepentingan kolonial dan geopolitik negara-negara Barat untuk memahami perubahan sosial di berbagai negara Asia Tenggara terutama dalam konteks poskolonial, yang kemudian dalam perkembangannya berupaya untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi narasi yang berasal dari Asia Tenggara itu sendiri. Namun masih terdapat tiga tantangan besar KAT dewasa ini.

Pertama, meskipun mulai berkurang, masih terdapat ketimpangan ekonomi-politik dalam hal produksi atau pembentukan pengetahuan mengenai Asia Tenggara antara berbagai pusat KAT di negara-negara maju (AS, Eropa Barat, Australia, Inggris, Jepang, dan Singapura) dan pusat KAT di daerah berkembang di Asia Tenggara. Dengan kata lain, komunitas epistemik KAT masih belum bisa keluar dari medan problematika yang secara gemilang dikemukakan oleh Ariel Heryanto (2007), yaitu "Mungkinkah ada orang Asia Tenggara dalam KAT?". Kedua, sebagai sebuah kajian keilmuan, KAT seringkali berada dalam posisi yang dilematis dalam menghadapi berbagai

perubahan tren dalam diskursus keilmuan, mulai dari kritik terhadap behavioralisme dan empirisme-positivisme yang dominan dalam beberapa segmen ilmu sosial (McVey, 1995), kritik terhadap badai posmodernisme yang terlampau asik dengan perdebatan semantik serta cenderung skeptis terhadap segala kemungkinan untuk melakukan analisa kausalitas dan kritik sosial (Budiman, 2013) hingga kemungkinan upaya untuk melakukan teoretisasi dan generalisasi berdasarkan pengetahuan atau narasi atas suatu kawasan yang juga memperhatikan keberagaman intra-kawasan dan antar kawasan (Chibber, 2013; Kuhonta, et al., 2008). Ketiga, pergeseran “pusat gravitasi” KAT dari AS ke Australia dan beberapa tempat lainnya di Asia (Pepinsky, 2011) serta perkembangan dunia pendidikan tinggi dan akademik di Indonesia terutama dengan meningkatnya berbagai skema beasiswa untuk studi pascasarjana bagi staf pengajar di perguruan tinggi juga akan mempengaruhi arah KAT ke depan, terutama di Asia Tenggara sendiri.

Berdasarkan tiga tantangan di atas, pembahasan kami tentang KAT terbagi menjadi empat bagian. Pertama, sejarah awal perkembangan KAT terutama yang dikembangkan oleh sejumlah negara-negara Barat. Kedua, tentang medan problematika KAT. Problematika tersebut, diantaranya: (a) ketimpangan ekonomi-politik produksi pengetahuan; (b) aspek sosiologi pengetahuan; (c) pengaruh historis KAT terhadap ilmu sosial dan humaniora di Indonesia dewasa ini; (d) dan posisi KAT yang ambivalen dalam hubungannya dengan beberapa paradigma ilmu sosial. Ketiga, refleksi atas perkembangan KAT secara teoritis dan filosofis. Keempat, pembahasan perkembangan masa depan KAT di Indonesia.

Sejarah Singkat Kajian Asia Tenggara

Sebagaimana dikemukakan oleh Thum (2012: 12), KAT awalnya merupakan proyek kolonialisme untuk menaklukkan masyarakat yang dijajahnya. KAT awalnya berkembang di Ecole des Langues Orientales Vivantes yang didirikan di Paris pada tahun 1795, pusat KAT di Leiden University, Belanda didirikan pada tahun 1864 dan School of Oriental and African Studies didirikan di London pada tahun 1917. Baik secara langsung maupun tidak langsung, KAT yang masih beraroma orientalis ini memberikan masukan penting bagi keberlangsungan kolonialisme di Asia Tenggara termasuk penjajahan Belanda di Indonesia.

Pasca PD II, KAT semakin berkembang pesat. Negara-negara Eropa Barat seperti Belanda, Perancis, dan Inggris merupakan kekuatan kolonial yang menjajah Asia Tenggara dan memiliki tradisi keilmuan KAT yang panjang. AS berusaha mengambil peranan yang lebih aktif dalam politik global dalam konteks Perang Dingin (*Cold War*) untuk melawan pengaruh Uni Soviet dan Komunisme dan karenanya terlibat dalam berbagai operasi militer di Asia

Tenggara termasuk Vietnam tentu memiliki kepentingan untuk memahami Asia Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa negara-negara lain seperti Australia, Jepang, Singapura, beberapa negara Eropa dan bahkan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina juga turut mengembangkan pusat KAT mereka masing-masing, tidak terlepas dari kepentingan geopolitik, ekonomi, dan hubungan internasional mendorong negara-negara tersebut untuk membentuk pusat KAT¹.

Bahkan, beberapa pusat KAT yang berada di Asia Tenggara sendiri, seperti *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS) di Singapura yang didirikan pada tahun 1971, program interdisipliner KAT di Malaysia yang didirikan pada tahun 1976 dan lembaga KAT yang berafiliasi dengan Akademi Ilmu-Ilmu Sosial Vietnam yang didirikan pada tahun 1973, meskipun didirikan oleh negara-negara Asia Tenggara sendiri, merupakan respon terhadap perubahan dari luar – terutama penarikan pasukan AS dari Vietnam pada tahun 1973 dan kemenangan kubu Komunis di Indocina pada tahun 1975 (Thum, 2012: 12). Sejarah perkembangan KAT semenjak masa kolonialisme hingga masa modern yaitu pasca-1945 dengan begitu menyiratkan satu pertanyaan besar: apakah KAT modern selalu “didefinisikan” oleh pihak luar?

Namun, melihat dan menilai KAT hanya sebagai manifestasi dan proyeksi hegemoni Barat dalam segala bidang merupakan pandangan yang setidaknya terlampau monolitik, jika bukan salah kaprah. KAT, sebagaimana disebutkan oleh McVey (1995: 1) juga menjadi “rumah akademik” bagi berbagai tendensi intelektual kritis dan radikal yang kemudian turut mengkritik berbagai agenda politik luar negeri AS di Asia Tenggara, termasuk Perang Vietnam. Kecenderungan yang sama juga terjadi di kajian kawasan lain, seperti Kajian Timur Tengah, Kajian Amerika Latin, dan Kajian Afrika, yang meskipun disponsori dan didanai oleh pemerintah AS namun menjadi ladang bagi bersemainya para intelektual yang kritis, baik dari Barat maupun dari kawasan-kawasan tersebut sendiri, dengan berbagai kepentingan dan relasi kuasa yang tercermin dalam diskursus kajian kawasan (Kendhammer, 2012).² Asia Tenggara sendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai sejarawan pengkaji Asia Tenggara, secara historis telah memiliki interaksi

- 1 Tentu terdapat perbedaan antara KAT di negara-negara Barat dengan KAT di Uni Soviet dan Cina. Secara umum, perkembangan KAT modern di Asia Tenggara lebih dibentuk oleh KAT di negara-negara Barat. Namun, bukan berarti tidak ada pengembangan KAT sama sekali di Uni Soviet, Cina dan negara-negara blok Komunis lainnya, meskipun pengembangan KAT di sana cenderung tidak semasif KAT di negara-negara Barat. Berkurangnya kepentingan strategis Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara dimulai pasca peristiwa 1965 di Indonesia. Lihat Hewitt (1982), Horn (1975) dan Mediansky (1984) untuk referensi mengenai perkembangan KAT di Cina dan Uni Soviet dan berkurangnya kepentingan strategis kedua negara tersebut. Komunisme berpengaruh terhadap perkembangan KAT di dua negara tersebut. Kemudian, perlu diingat bahwa para pengkaji KAT di Cina dan Uni Soviet cenderung menulis dalam bahasa sendiri dibandingkan bahasa Inggris, yang tentu berpengaruh terhadap diseminasi KAT dari Uni Soviet dan Cina di Asia Tenggara. Dalam tulisan ini, kami hanya fokus kepada perkembangan KAT di negara-negara Barat.
- 2 Ini merupakan pemaparan dari seorang ilmuwan politik pengkaji Afrika dalam kuliahnya dapat ditonton di <http://vimeo.com/36505367>

intra-kawasan dan antar kawasan yang cukup lama sebelum kedatangan kolonialisme (Abinales & Amoroso, 2005; Christie, 1995).³ Tetapi, terlepas dari dimensi kritis sekaligus emansipatoris KAT yang berdasarkan narasi lokal, perkembangan KAT masih belum bisa menjawab satu persoalan utama yang dikemukakan oleh Ariel Heryanto secara gemilang: bisakah dan mungkinkah orang-orang Asia Tenggara sendiri melakukan KAT?

Medan Persoalan KAT

Pertanyaan di atas setidaknya menyentuh empat persoalan utama dalam KAT: *pertama*, ketimpangan ekonomi-politik produksi pengetahuan KAT antara negara-negara maju dan berkembang; *kedua*, aspek sosiologi pengetahuan dari perkembangan KAT terkait dengan posisi pengkaji KAT lokal dengan KAT; *ketiga*, persoalan bagaimana konteks historis kelahiran KAT mempengaruhi perkembangan KAT hingga sekarang, terutama di Indonesia; *keempat*, posisi KAT yang ambivalen dan dilematis dalam hubungannya dengan arus utama beberapa segmen ilmu sosial yang mengutamakan teoretisasi berdasarkan generalisasi atas parkularitas empirik maupun tren Posmodernisme dalam berbagai variannya (belokan kesejarahan, kebahasaan, maupun kebudayaan)⁴ yang tidak selalu selaras dengan penekanan pada narasi yang bersifat lokal merupakan salah satu kecenderungan KAT dan kajian kawasan pada umumnya. Bagian ini akan menguraikan pokok-pokok permasalahan tersebut satu persatu.

Persoalan *pertama* adalah kesenjangan atau ketimpangan “basis ekonomi-politik” dari proses produksi pengetahuan KAT antara negara-negara maju dan berkembang. Ketimpangan ini, telah berlangsung sejak masa kolonial, masih belum sepenuhnya dihilangkan atau setidaknya diminimalisir. Kesenjangan ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pembentukan pengetahuan dalam KAT itu sendiri. Karena, sebagaimana halnya berbagai disiplin akademik yang lain, keberlangsungan KAT tidak lepas dari ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung, mulai seperti koleksi buku, jurnal, dan literatur yang mumpuni dan terus diperbaharui, relasi yang baik dan berkesinambungan dengan komunitas epistemik yang menaungi KAT—Asosiasi Studi Asia misalnya, dukungan kelembagaan atas aktivitas keilmuan yang berkaitan dengan KAT, seperti penyediaan cuti akademik dan pembebasan dari kewajiban mengajar (*sabbatical*) yang memungkinkan pengkaji KAT untuk menulis artikel ilmiah dan buku yang komprehensif, dan lain sebagainya. Apabila sumber “basis material” yang

3 Dalam KAT, berbagai literatur sejarah terutama yang membahas mengenai sejarah hubungan antar berbagai entitas politik dan pembentukan negara di Asia Tenggara dan Asia Timur telah menunjukkan interaksi yang panjang antara berbagai entitas politik pranegara-bangsa modern di dua kawasan tersebut sebelum kedatangan kolonialisme.

4 Terjemahan dari istilah *historical, linguistic and cultural turns*. Salah satu pemaparan terlengkap mengenai tren belokan kesejarahan, kebahasaan dan kebudayaan dalam ilmu-ilmu sosial dapat dilihat di Sewell (2005).

memungkinkan tersedianya berbagai sarana dan infrastruktur pendukung KAT adalah pendanaan, maka salah satu sumber permasalahan yang dapat kita identifikasi adalah penurunan dana bagi KAT itu sendiri. Penurunan terutama di AS, Inggris dan Australia terutama semenjak pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mulai menurun semenjak paruh akhir dekade 1990an (Thum, 2012). Penurunan dana untuk KAT di negara-negara tersebut kemudian berimbas tidak hanya pada keberlangsungan KAT di negara-negara tersebut namun juga pada pengembangan KAT di Asia Tenggara sendiri.

Persoalan *kedua* adalah aspek sosiologis dari perkembangan KAT terkait dengan posisi pengkaji KAT lokal dalam KAT. Uraian Heryanto (2007) dan Lowe (2007) secara bernas menjelaskan berbagai problematika yang berkaitan dengan hubungan tersebut dan dampak terhadap prospek pengembangan KAT di Asia Tenggara sendiri. Dalam konteks perkembangan KAT secara umum, Heryanto menunjukkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para pengkaji KAT yang berasal dari Asia Tenggara sendiri.

Pertama, status para pengkaji KAT lokal sebagai “orang dalam” (*insider*) dalam masyarakat Asia Tenggara sendiri menjadikan mereka terlampau dan kurang berkualifikasi di saat yang bersamaan—terlampau berkualifikasi dalam hal bahasa, pengalaman tinggal di masyarakat dan pengetahuan atas masyarakat mereka sendiri, namun kurang berkualifikasi dalam hal kemampuan berpikir analitis dan teoretisasi secara akademik (hlm. 79). Karenanya, seorang Thailand atau Indonesia tidak dapat menjadi “ahli Asia Tenggara”, melainkan hanya “ahli Thailand” atau “ahli Indonesia”. Sebaliknya, pengkaji berkebangsaan asing, meskipun hanya mengetahui hal-hal tertentu secara mendalam tentang Asia Tenggara, misalnya industri lukisan di Bali atau pusat-pusat hiburan di Bangkok, dapat menjadi “ahli Asia Tenggara” (hlm. 80).

Kedua, dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar KAT dan kurangnya pemakaian bahasa-bahasa Asia Tenggara sendiri dalam KAT juga menghambat perkembangan KAT untuk menjadi sebuah bidang keilmuan yang lebih “pluralis, inklusif, dan partisipatoris” (hlm. 88). Kritik ini bukan berarti menolak penggunaan bahasa Inggris dalam KAT, melainkan sekedar mengingatkan bahwa berbagai paradigma epistemologis dalam KAT dan ilmu sosial humaniora pada umumnya yang berakar pada bahasa Inggris beresiko “menormalisasi” kesalahpahaman dan misrepresentasi intelektual Asia Tenggara sebagai objek studi (hlm. 89). Oleh karena itu, penguasaan akan bahasa-bahasa Asia Tenggara dan penggunaan serta pemanfaatannya dalam KAT menjadi penting – suatu hal yang diakui oleh Heryanto sendiri menjadi semakin susah belakangan ini (hlm. 90).

Ketiga, dominasi⁵ formalitas kelembagaan dan intelektual KAT di negara-negara maju seperti pertanyaan apa yang harus dijawab, data apa yang harus dicari dan metode apa yang harus diikuti, dengan kata lain proses pembentukan diskursus KAT di negara-negara maju, bisa jadi berjarak dengan masyarakat yang dipelajari, jikalau bukan tidak relevan sama sekali. Keempat, masih terdapat beberapa kasus hubungan yang bersifat patronistik antara pengkaji KAT senior terhadap anak didiknya dan pengkaji KAT junior yang lain—misalnya, tekanan dari pengkaji KAT senior untuk mengutip karya-karyanya terhadap pengkaji KAT junior terlepas dari proses *blind peer-review* dan kemungkinan kurang relevannya karya tersebut untuk dikutip (hlm. 94). Senada dengan refleksi Heryanto, analisa Lowe (2007) atas pola kolaborasi antara peneliti asing dan peneliti lokal di Indonesia, Vietnam dan Thailand menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan dan perbedaan persepsi mengenai apa yang menjadi prioritas dalam sebuah proyek penelitian, dalam disiplin sejarah, studi lingkungan dan ekologi, konservasi dan bahkan ilmu-ilmu alam. Dalam sebuah proyek penelitian mengenai konservasi di Pulau Togean misalnya, peneliti Indonesia diharapkan untuk memasok data dan menguasai paradigma, teori dan istilah-istilah dari berbagai literatur Euro-Amerika, sedangkan hal yang sebaliknya seringkali tidak dilakukan oleh rekan peneliti asing mereka (hlm. 113). Berdasarkan narasi Heryanto dan Lowe, secara umum tidaklah berlebihan untuk menyimpulkan bahwa posisi peneliti KAT lokal dalam KAT sendiri, terutama peneliti KAT lokal yang mengkaji negaranya sendiri, sesungguhnya sangat problematis. Tentu saja, persoalan ini bukan hanya dihadapi oleh KAT, tetapi juga berbagai disiplin lainnya dalam ilmu sosial dan humaniora terutama dalam tradisi kajian kawasan, di mana selalu ada ketimpangan struktural dan relasi kuasa antara peneliti dan masyarakat yang dipelajari, terutama dalam konteks poskolonial.

Persoalan *ketiga* adalah konteks kelahiran KAT, dan kajian kawasan secara umum, yang sedikit banyak mempengaruhi perkembangan KAT pasca kelahirannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward Said (1979), pada awalnya pengetahuan dan gambaran tentang “Timur” dan “yang Liyan” (*the Other*) merupakan proyeksi kekuasaan Barat. Dengan kata lain, sejarah awal KAT tidak lepas dari sejarah upaya kolonialisme Barat di Asia Tenggara melalui diskursus dan pengetahuan tentang masyarakat yang dijajahnya. Namun, sebagaimana disebut di atas oleh McVey (1995), menganggap KAT secara inheren adalah disiplin ilmu yang berorientasi orientalis dan konservatif bisa jadi terlampaui simplistik karena para pengkaji KAT sendiri

5 Kami menggunakan istilah “dominasi” dan bukan “hegemoni” untuk menunjukkan bahwa dominannya formalitas kelembagaan dalam KAT, terutama masih bergantungnya KAT terhadap universitas dan lembaga-lembaga yang terkait dengannya tidak serta merta menghambat pertumbuhan KAT di luar universitas. Heryanto (2007) sendiri memberikan contoh yang baik dalam tulisan mengenai bagaimana berbagai jurnal akademik/ilmiah tentang Kajian Asia seperti *Inter-Asia Cultural Studies* dan *Traces* berusaha mengundang dan mempromosikan kontribusi tulisan dan karya-karya lainnya dari pengkaji Asia yang berbasis di Asia dan/atau berbasis di luar institusi universitas.

justru melawan dua tendensi tersebut. Para pengkaji KAT sendiri, setidaknya generasi awal seperti Georger McTurnan Kahin, Benedict Anderson, dan Ruth McVey, bisa dibilang merupakan bagian dari generasi intelektual Kiri Baru (*New Left*) yang juga menjadi bagian dari gerakan hak-hak sipil dan oposisi terhadap Perang Vietnam di AS di tahun 1960-an.

Tetapi, upaya dari para pengkaji KAT ini justru menjadi semacam persoalan baru: KAT sebagai sebuah disiplin ilmu akhirnya didefinisikan *dari luar*. KAT menjadi semacam diskursus perlawanan atau negasi terhadap penggunaannya untuk kepentingan kolonialisme dan kebijakan luar negeri Barat yang dianggap oleh para pengkaji KAT sebagai imperialistis misalnya Perang Vietnam, namun perumusan KAT sebagai diskursus perlawanan tersebut hanya dapat dimungkinkan dengan adanya eksistensi kemungkinan penggunaan pengetahuan yang bersumber dari KAT untuk kepentingan politik luar negeri yang ekspansionis *dari luar*. Bahkan, upaya beberapa karya historiografi alternatif tentang sejarah Asia Tenggara yang mengupas relasi kuasa (Anderson, 1978; Winichakul, 1994) atau membawa pendekatan “sejarah dari bawah”⁶ (*history from below*) (Larkin, 1982; McCoy, 1982) dari beberapa pengkaji KAT juga sedikit banyak terdefiniskan dalam hal kritik dan oposisi mereka terhadap historiografi nasionalis yang elitis.

Tentu persoalan ini bukan saja dihadapi oleh KAT Kajian Asia Selatan dan studi *subaltern* misalnya (Guha & Spivak, 1988), yang menginspirasi studi poskolonial, juga menghadapi persoalan serupa - eksistensinya terdefiniskan oleh kritik mereka atas historiografi nasionalis-elitis. Tanpa bermaksud mengurangi potensi emansipatoris dari KAT dan kajian kawasan pada umumnya terutama dalam hal memberi suara kepada masyarakat yang dipelajarinya, mungkin diperlukan orientasi baru dalam KAT yang mampu melampaui karakter KAT sekedar sebagai kritik dan oposisi terhadap proyek orientalisme dan kolonialisme menuju perumusan solusi atas ekkses dari dua proyek tersebut.

Persoalan *keempat*, yang terakhir namun tidak kalah penting, adalah posisi KAT yang ambivalen dan dilematis dalam berbagai tren dalam ilmu sosial humaniora. Terutama antara dorongan generalisasi yang menjadi ciri khas dalam beberapa segmen dalam ilmu sosial dan Posmodernisme dan berbagai variannya. Masa awal perkembangan KAT modern dan kajian kawasan pada umumnya ditandai dengan posisi yang ambivalen terhadap paradigma arus utama beberapa segmen ilmu sosial di AS, terutama

6 Pendekatan “Sejarah Dari Bawah” atau *History from Below* merupakan pendekatan historiografi yang mengalihkan perhatian dari penulisan sejarah yang berpusat pada “orang-orang besar” seperti pemimpin politik dan elit pada umumnya ke “orang-orang biasa” seperti buruh, petani, perempuan dan segenap kelompok *subaltern* lainnya. Salah satu contoh representasi terbaik dari pendekatan ini adalah karya klasik E.P. Thompson (1964), *The Making of the English Working Class*.

behavioralisme⁷ dan empirisisme-positivisme⁸. KAT, yang mementingkan narasi dan pemahaman sejarah, dianggap hanya sebagai pelengkap bagi para ilmuwan dengan paradigma arus utama behaviorisme yang mementingkan generalisasi atas berbagai partikularitas empirik yang tercerabut dari konteks dan kesejarahannya. Paradigma seperti ini seringkali bertabrakan atau tidak serta merta sejalan dengan sensitivitas akan bagaimana kontijensi sejarah dan spesifitas lokal berimplikasi pada kondisi terkini suatu masyarakat.

Disisi lain, KAT juga mengalami ketegangan dalam hubungan dengan apa yang bisa disebut secara generik sebagai 'badai posmodernisme'. Paradigma posmodernisme, yang sedikit banyak berimplikasi kepada penolakan atas upaya-upaya membuat hubungan kausalitas yang dibawa ke titik ekstrim atas nama resistensi terhadap paradigma apapun yang menawarkan suatu bentuk 'totalitas' gagasan dengan dalih pembelaan terhadap 'yang Liyan' juga tidak serta merta disambut oleh para pengkaji KAT yang mempromosikan kajian konektif atau komparatif dengan kawasan lain, pengkaji KAT yang berlatar belakang ilmu sosial yang meskipun tidak selalu Behavioralis namun masih berpegang pada asumsi bahwa hubungan kausalitas dapat dirumuskan dan para pengkaji KAT yang berargumen bahwa dalam dalih pembelaannya atas 'yang Liyan', Posmodernisme sesungguhnya sangatlah esensialis dan karenanya mengaburkan berbagai keragaman dan spesifitas kultural dan geografis dari apa-apa yang dikategorikan sebagai 'yang Liyan'.

Refleksi Teoretik Perkembangan KAT

Menanggapi empat masalah utama yang KAT, kami berargumen bahwa terdapat empat jawaban terhadap permasalahan tersebut. *Pertama*, menurunnya pendanaan untuk KAT di Amerika Utara dan Eropa bisa dibilang memberi kesempatan bagi pengembangan KAT di luar Amerika Utara dan Eropa. *Kedua*, berdasarkan pengalaman para pelaku dan pengkaji KAT, perkembangan KAT ke depan dapat lebih sensitif terhadap aspek sosiologis yang menyangkut hubungan antara KAT dengan masyarakat yang dipelajarinya. *Ketiga*, KAT, seperti kajian kawasan yang lain, dapat bergerak lebih jauh dan melampaui konteks kelahiran yang membentuk

7 Behavioralisme, secara garis besar dapat dipahami sebagai upaya memahami politik dengan fokus utama kepada perilaku aktor-aktor sosial-politik merupakan reaksi terhadap dominannya institusi kelembagaan yang dianggap abai pada kenyataan empirik di lapangan. Dalam konteks yang lebih besar, kita dapat menempatkan Behavioralisme sebagai bagian dari tren empirisisme-positivisme dalam ilmu-ilmu sosial. Untuk penjelasan yang cukup singkat, baik dan jelas tentang behaviorisme dapat dilihat di Farr (1995).

8 Kami menggunakan istilah 'empirisisme-positivisme' untuk menunjukkan kesinambungan antara empirisisme dan positivisme secara umum. Empirisisme-positivisme dapat dipahami sebagai sebuah paradigma ilmu sosial yang mengutamakan generalisasi atas berbagai partikularitas empirik yang cenderung abai pada dimensi kesejarahan, konteks dan relasi kuasa dari suatu fenomena sosial. Dari segi filsafat ilmu, empirisisme-positivisme merupakan pengaruh fisika Newtonian dalam variannya yang mekanistik dan menekankan pada prediktabilitas dalam ilmu-ilmu sosial, contohnya model kausalitas suksesi Humean. Untuk referensi lihat Farr (1988).

hingga kini menuju kajian kawasan yang ilmiah namun emansipatoris di saat bersamaan. *Keempat*, KAT secara teoretik dapat memposisikan diri sebagai kajian kawasan yang peka terhadap keragaman kawasan sekaligus mampu membuat generalisasi tanpa harus jatuh kepada generalisasi ala arus utama behavioralisme dan empirisisme-positivisme dalam ilmu sosial maupun anti-kausalitas ala posmodernisme dan beberapa tradisi dalam kajian humaniora.

Pertama, menurunnya pendanaan dan berbagai jenis sumber daya lainnya untuk studi KAT di berbagai pusat-pusat tradisional KAT terutama di Amerika Utara di satu sisi memang menjadi tantangan bagi pengembangan KAT di pusat-pusat tradisional tersebut. Namun, di sisi lain, ini menjadi semacam berkah atau kesempatan bagi berbagai pusat KAT di tempat lain termasuk di Asia sendiri. Berbagai data di lapangan sekaligus refleksi pengalaman penulis sendiri mengonfirmasi pengamatan tersebut. Di Amerika Utara, khususnya AS, kebijakan ekonomi-politik neoliberal yang berorientasi kepada penyelerasan dunia pendidikan tinggi dan prinsip-prinsip pasar yang dicanangkan selama tiga dekade terakhir semenjak masa kepresidenan Ronald Reagan telah mengakibatkan penurunan dana untuk pendidikan tinggi terutama untuk jurusan-jurusan ilmu sosial dan humaniora (Giroux, 2002).

Ini juga berimplikasi kepada penurunan dana untuk berbagai jenis kajian kawasan termasuk KAT yang mencapai puncak pada tahun 2011. Pendanaan pemerintah federal untuk kajian kawasan yang berada dalam payung *Title VI Programs*⁹ (selanjutnya *Title VI*) yang dikelola oleh Departemen Pendidikan AS (US Department of Education, 2011), mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar. Pada tahun 2011, pendanaan *Title VI* dipangkas sebesar US\$ 50 juta atau sekitar 40% disusul dengan pemangkasan dana sebesar 2% di tahun 2012 (National Humanities Alliance, 2013).

Pemangkasan pendanaan *Title VI* tentunya memiliki implikasi yang sangat besar dalam berbagai dimensi KAT, terutama pada aspek keberlangsungan kelembagaan dan kesehatan finansial berbagai pusat KAT di AS. Karenanya, Asosiasi Kajian Asia (*Association for Asian Studies*) telah menggalang berbagai upaya untuk menekan Kongres AS untuk meningkatkan kembali pendanaan untuk Kajian Asia termasuk KAT (*Association for Asian Studies*, n.d.). Tantangan ini sesungguhnya tidak hanya dihadapi oleh Kajian Asia dan KAT saja, melainkan oleh berbagai kajian kawasan yang lain, seperti Kajian Afrika (*African Studies Association*, 2013) dan Kajian Slavik, Eropa Timur dan Eurasia (Adams, 2013).

Pemangkasan dana ini bahkan sangat mempengaruhi berbagai pusat kajian kawasan yang memiliki tradisi panjang. Berbagai pusat kajian kawasan di Harvard University misalnya terpaksa harus mencari sumber pendanaan

9 *Title VI Programs* adalah pendanaan pemerintah federal untuk berbagai studi kajian kawasan di Amerika Serikat.

alternatif selain pendanaan dari pemerintah federal seperti sumbangan pribadi dan pendanaan tambahan dari administrasi Harvard University sendiri (Jain & Wu, 2012). Contoh lain, pusat Kajian Asia terkemuka East-West Center (EWC) yang bermarkas di University of Hawaii at Manoa dan didirikan dengan mandat pemerintah federal misalnya juga mengalami pemangkasan dana - meskipun baru-baru ini permohonan EWC untuk dana tambahan telah disetujui oleh sebuah komite di Senat AS (Honolulu Star Advertiser, 2013).

Pengalaman pribadi penulis dalam menempuh studi di dua universitas di AS dengan tradisi KAT yang cukup panjang juga menunjukkan pentingnya pendanaan *Title VI* bagi keberlangsungan pusat KAT. Di Ohio University misalnya, selama beberapa tahun terakhir pusat KAT Ohio University tidak lagi mendapat jatah pendanaan *Title VI*, yang menyebabkan pusat KAT-nya terpaksa harus dilebur ke dalam pusat Kajian Asia meskipun tetap memiliki otonominya sendiri (Ohio University, n.d.). Di sisi lain, pusat KAT di Northern Illinois University, tempat penulis belajar sekarang, cukup aktif dan hidup karena mendapat sokongan pendanaan *Title VI*. Meskipun perlahan-lahan terdapat upaya untuk menaikkan anggaran *Title VI*, secara umum dapat dikatakan bahwa tren KAT di Amerika Utara termasuk pendanaannya menurun dibandingkan beberapa dekade yang lalu.

Tetapi, sebagaimana disebutkan di atas, fenomena ini menjadi semacam peluang bagi pusat-pusat KAT di luar Amerika Utara,¹⁰ seperti Australia, Jepang dan Singapura, yang kemudian dimanfaatkan baik oleh mereka untuk mengembangkan KAT secara pesat. Di Australia misalnya, meskipun terjadi tren penurunan minat untuk studi-studi Indonesia (Hyland, 2012), secara garis besar dapat dikatakan bahwa Australia mungkin telah menyalip Amerika Serikat (AS) sebagai pusat kajian Indonesia dalam tradisi kajian kawasan. Menurut Pepinsky (2011), mengutip pernyataan Edward Aspinall, salah satu Indonesianis terkemuka, pusat produksi pengetahuan kajian tentang Indonesia khususnya politik Indonesia telah berpindah dari AS ke Australia (hlm. 2). Kemudian, baru-baru ini pemerintah federal Australia kembali mengucurkan dana sebesar \$AUS 15 juta untuk membangun pusat kajian Indonesia baru yang bernama *the Australian Centre for Indonesia Studies* yang berpusat di Monash University dengan cabang di University of Melbourne, Australian National University dan CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation*), akademi sains nasional-nya Australia (ABC Radio Australia, 2013). Di Singapura, berbagai pusat studi yang fokus kepada kajian Asia termasuk KAT seperti ISEAS (*Institute for Southeast Asian Studies*, n.d.) ARI (*Asia Research Institute*, n.d.)¹¹ di NUS

10 Perkembangan KAT di Benua Eropa, terutama Eropa Barat, bisa dikatakan mengikuti kecenderungan perkembangan KAT di Amerika Utara. Lihat laporan majalah tempo mengenai perkembangan KAT di Eropa Barat di Tempo (2011).

11 Lihat <http://www.ari.nus.edu.sg/>

(*National University of Singapore*) dan RSIS (*Rajaratnam School of International Studies*, n.d.)¹² di NTU (*Nanyang Technological University*) berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir dalam berbagai lini – mulai dari publikasi, skema, pelatihan penelitian, pengembangan berbagai skema penelitian dan fasilitas periset tamu, hingga pengembangan program pascasarjana. Bahkan, berbagai kelompok kerja riset yang khusus mengkaji Indonesia (*Asia Research Institute*, n.d.; *Indonesia Programme*, n.d.)¹³ juga berkembang di pusat-pusat studi tersebut. Di Jepang, selain ekspansi dari berbagai pusat KAT yang sudah mapan seperti pusat KAT di *Kyoto University*, proses internasionalisasi pendidikan tinggi di Jepang yang berlangsung cukup pesat selama beberapa tahun terakhir ini (*ICEF Monitor*, 2013; *Yonezawa*, 2009) juga berimbas ke internasionalisasi berbagai program studi di universitas-universitas Jepang, termasuk program studi KAT dan publikasi tentang KAT dalam bahasa Inggris (*Center for Southeast Asian Studies Kyoto University*, 2012; 2013; *Network for Southeast Asian Studies*, n.d.)¹⁴. Pesatnya perkembangan KAT di negara-negara tersebut juga didukung oleh proses regenerasi sarjana dan pengkaji KAT, yang sepertinya berlangsung agak lambat di kampus-kampus Amerika Utara.¹⁵ Berbagai penjelasan di atas secara garis besar menunjukkan bahwa seiring dengan penurunan studi KAT di Amerika Utara, studi KAT di negara-negara lain yang terletak di kawasan Asia-Pasifik berkembang cukup pesat.

Kedua, berbagai permasalahan sosiologis yang terkait dengan KAT sebagai sebuah disiplin ilmu sesungguhnya menjadi sebuah pesan bagi KAT untuk lebih sensitif terhadap permasalahan tersebut terutama dalam konteks hubungan KAT dengan masyarakat yang dipelajarinya. Beberapa pesan yang dapat diambil dari pemaparan Heryanto dan Lowe antara lain adalah pertama, pentingnya memungkinkan dan membina hubungan yang lebih egaliter antara pengkaji KAT senior dan junior maupun pengkaji KAT Barat dan lokal. Kedua, tantangan yang lebih berat adalah bagaimana membawa potensi hubungan yang egaliter tersebut tidak hanya di level personal namun juga kelembagaan – terutama dalam hal mempromosikan riset tentang KAT di lembaga-lembaga yang berasal dan berbasis di Asia Tenggara sendiri.

12 Lihat <http://www.rsis.edu.sg/>

13 Lihat http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=336 dan http://www.rsis.edu.sg/Indonesia_Prog/index.asp

14 Contohnya adalah dua terbitan berbahasa Inggris dari *Center for Southeast Asian Studies* di *Kyoto University* yaitu *Jurnal Southeast Asian Studies* (<http://englishkyoto-seas.org/>) dan *website Kyoto Review of Southeast Asia* (<http://kyotoreview.org/>).

15 Hal ini lebih merupakan observasi pribadi penulis dibandingkan analisa yang mendalam mengenai proses regenerasi dan rekrutmen pengkaji KAT baru di berbagai departemen ilmu sosial dan humaniora di kampus-kampus Amerika Utara terutama AS. Namun, bukan berarti tidak terdapat generasi baru pengkaji KAT di kampus-kampus tersebut. *Northern Illinois University*, *Ohio University*, *Cornell University*, *Arizona State University*, *University of Chicago*, *University of Oregon* dan *University of British Columbia* adalah beberapa contoh kampus-kampus di Amerika Utara yang melakukan regenerasi dalam KAT dengan merekrut para pengkaji KAT muda di berbagai program ilmu sosial dan humaniora mereka.

Dalam kaitannya dengan poin pertama dan kedua, perkembangan di KAT sendiri menunjukkan kemungkinan untuk mempromosikan pola hubungan yang lebih egaliter tersebut, terutama dengan meningkatnya profil dan produktivitas beberapa pengkaji KAT yang berasal dari Asia Tenggara sendiri.¹⁶

Tantangan *ketiga* dan dapat dibilang paling berat adalah bagaimana agar KAT bisa lebih relevan bagi masyarakat yang dipelajarinya secara langsung dan memungkinkan masyarakat yang dipelajari juga menjadi subyek dan bukan sekedar obyek dalam proses pembelajaran tersebut.¹⁷ Persoalan ini tentu bukan saja dihadapi oleh KAT - berbagai kajian kawasan dan disiplin ilmu sosial humaniora yang lain juga mengalami permasalahan serupa. Pembahasan ini juga berkaitan dengan jawaban yang ketiga tentang pentingnya KAT untuk dapat bergerak melampaui konteks kelahirannya sebagai sebuah diskursus konter-hegemonik atas diskursus lama kajian kawasan yang bernuansa orientalis menjadi sebuah diskursus kawasan yang ilmiah namun emansipatoris di saat yang bersamaan.

Keempat dan yang terakhir adalah kemungkinan bagi KAT untuk merumuskan posisi teoretik yang dapat peka terhadap konteks historis dari Asia Tenggara serta keberagaman dan spesifitas kultural dan geografis yang bersifat intra-kawasan maupun antar kawasan tanpa terjebak oleh generalisasi empiris yang ahistoris maupun posisi anti-kausalitas dan anti-generalisasi yang ekstrim. Posisi KAT yang ambivalen dan dilematis terhadap dua tren besar dalam ilmu sosial-humaniora ini telah diprediksi dan dianalisa dengan sangat baik oleh Curaming (2006), Jackson (2003a; 2003b) dan McVey (1995). McVey (1995), seorang veteran dalam KAT, mencoba membahas KAT dalam hubungannya dengan arus utama ilmu sosial di AS, dan berpendapat bahwa kedepannya kajian-kajian yang menarik tentang Asia Tenggara akan muncul dari kajian ilmu sosial dan humaniora yang memakai pendekatan historis dan antropologis, kajian humaniora terutama kajian gender dan studi ekologi atau lingkungan, dan pendekatan ekonomi-politik dalam melihat dampak kapitalisme di Asia. Dalam kaitannya dengan tren Posmodernisme, Jackson (2003a; 2003b) menganjurkan sekaligus mengkritik pendekatan Posstrukturalis¹⁸ dalam KAT.

16 Studi Indonesia dalam KAT, kita mengenal Ariel Heryanto (profesor di Australian National University) dan Vedi Hadiz (profesor di Murdoch University), sedangkan untuk studi Thailand dalam KAT kita mengenal Thongchai Winichakul (profesor di University of Wisconsin-Madison) yang sekarang menjadi Presiden Asosiasi Kajian Asia (*Association for Asian Studies*).

17 Pelan-pelan ini sudah dilakukan misalnya oleh beberapa lembaga dan pengkaji KAT di Asia Tenggara. Lihat catatan kaki nomor 6 mengenai hal ini. Promosi riset dengan pendekatan aksi dan partisipatoris (PAR, *Participatory Action Research*) juga mungkin dapat membantu mempromosikan KAT yang ilmiah namun juga emansipatoris.

18 Jackson menggunakan istilah 'posstrukturalis' dalam artikelnya. Dalam konteks ini, kami menggunakan istilah posstrukturalis dan posmodernis secara bergantian untuk merujuk kepada hal yang sama. Meskipun kami sadar akan perbedaan di antara kedua istilah tersebut, pembahasan tersebut berada di luar jangkauan artikel ini.

Menurut Jackson, pendekatan posmodernisme atau pos-strukturalisme memiliki potensi yang amat besar dalam melakukan kritik atas pendekatan atau kerangka keilmuan yang sudah mapan sekaligus sebagai paradigma riset. Namun, Jackson tetap mengkritik kecenderungan posstrukturalisme yang melihat 'yang Liyan' secara esensial. Bagi Jackson, pendekatan posstrukturalis harus peka terhadap realitas empirik di lapangan terutama perbedaan spasial-kultural antara Barat (Eropa dan AS) dengan Timur (Asia Tenggara), antara negara-negara dalam Asia Tenggara sendiri dan bahkan antara tempat dan entitas kultural di dalam satu negara atau lokalitas tertentu. Menanggapi Jackson, Curaming (2006) berpendapat bahwa posstrukturalisme dan kajian kawasan justru susah dipadukan karena perbedaan dua posisi epistemologis dua pendekatan tersebut akan menegasikan atau menihilkan satu sama lain. Menurut Curaming, posstrukturalisme baru bermanfaat dalam hal 'dekonstruksi' perspektif-perspektif yang sudah mapan dalam kajian kawasan, namun ia tidak atau belum bermanfaat dalam hal 'rekonstruksi' pasca pengkajian ulang berbagai perspektif yang sudah mapan tersebut.

Menanggapi berbagai perdebatan tersebut, kami mencoba menawarkan suatu posisi teoretik alternatif: KAT secara teoretik dapat memposisikan dirinya sebagai kajian kawasan yang peka terhadap keragaman kawasan sekaligus mampu membuat generalisasi tanpa harus terjebak dalam tendensi empirisisme-positivisme maupun posmodernisme.¹⁹ Pertama-tama, untuk lebih memahami ambivalensi KAT dalam menghadapi berbagai tren keilmuan ini, kita perlu menempatkannya dalam kerangka Kuhnian (Kuhn, 1970) terutama dalam analisisnya atas perkembangan 'sains normal'. Kuhn berpendapat bahwa sains normal merujuk kepada suatu pemahaman akan sains sebagai bangunan dan susunan-susunan pengetahuan yang berdasarkan kepada konvensi-konvensi (intersubjektif) dalam suatu disiplin pengetahuan. Beberapa contoh sains normal adalah berbagai cabang dalam ilmu alam (biologi, kimia, dan fisika). Dalam kaitan dengan ilmu sosial, terdapat suatu masa di mana ilmu sosial, terutama beberapa tendensi dalam ilmu politik, ekonomi dan sosiologi, memiliki "kecemburuan" untuk menjadi sains normal seperti ilmu alam terutama dalam versi newtonian-mekanistik (Farr, 1988). Hal ini juga yang menjelaskan kecenderungan empiris-positivis dalam ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian Kuhn berupaya menunjukkan 'sisi sosial' dari apa-apa yang disebut sebagai sains normal. Menurut Kuhn, pergeseran paradigma juga memiliki kecenderungan intersubjektif, dan karena perubahan praktek dan konvensi dalam sains normal bisa jadi lebih dipengaruhi oleh suatu perubahan kultur keilmuan (dari empirisisme-positivisme ke posmodernisme) dari para ilmuwan itu sendiri atau perubahan

19 Kritik kami atas empirisisme-positivisme sekaligus posmodernisme dan rumusan teoretik alternatif yang kami tawarkan ada baiknya dibaca sebagai kritik dan rumusan teoretik dari perspektif pengkaji ilmu sosial. Kritik dan rumusan teoretik yang bersifat filosofis dan yang lainnya berada di luar jangkauan tulisan ini.

sosial-politik dari luar yang nyata (dari kolonialisme ke kepentingan geopolitik Barat pasca-PD II) alih-alih oleh suatu lompatan atau terobosan keilmuan yang nyata dalam sains normal. Pergeseran tema dan kajian riset terjadi terkadang bukan karena berbagai pertanyaan dalam tema dan kajian sebelumnya terjawab, melainkan karena terdapat suatu dorongan lain.

Argumen yang senada juga diungkapkan oleh Berger dan Luckmann (1979) yang membahas proses-proses sosial yang melibatkan produksi pengetahuan di dalam masyarakat dan karenanya pengetahuan, terutama ilmu-ilmu sosial, tidak selalu bebas dari unsur-unsur subyektivitas nilai, kepentingan, dan relasi kuasa. Analisa dan posisi teoretik mengenai relasi kuasa dalam pembentukan diskursus yang lebih eksplisit diutarakan oleh Foucault (1995). Foucault menggambarkan kekuasaan dan kekuatan untuk menghukum bergantung kepada pengetahuan. Dengan kata lain, pengetahuan sesungguhnya merupakan turunan atau derivasi dari kuasa. Kritik yang ekstensif atas relasi kuasa tersebut juga yang memungkinkan "pemberontakan oleh pengetahuan yang ditaklukkan" (*insurrection of subjugated knowledges*) (Foucault, 2003, hlm. 6-7) yang juga dirumuskan oleh Spivak (1988) dengan pertanyaan "bisakah *Subaltern* berbicara? (bagi dirinya sendiri?) (*can the Subaltern speak?*).

Berangkat dari berbagai kritik tersebut, perlu dicatat bahwa analisa kami bukan berarti melegitimasi posisi 'anti-sains', namun sekedar menggambarkan bagaimana aktivitas-aktivitas ilmiah tidak lepas dari dimensi sosial yang inheren didalamnya. Pada titik ini, posisi kritik kami lebih dekat dengan tradisi Kuhnian dan Bergerian dan bersimpang jalan dengan posisi Foucaultian. Dalam pandangan kami, perlu dibedakan antara penggunaan sains untuk kepentingan orientalisme, kolonialisme dan imperialisme dengan posisi anti-sains. Setidaknya ada tiga alasan melegitimasi tawaran posisi teoretik kami untuk KAT. Pertama, mengutip Wood (2002), perlu dibedakan antara sisi positif modernitas dan sisi eksploitatifnya yang terwujud dalam kapitalisme (hlm. 182-183).

Banyak proyek-proyek modernitas pencerahan yang bersifat non-absolutis dan non-kapitalis (hlm. 183) dan karenanya non-eksploitatif. Hal-hal seperti universalitas yang anti-privilese, nilai-nilai emansipasi universal yang tidak hanya eksklusif untuk kelas borjuis yang juga sudah diutarakan oleh figur-figur awal pencerahan seperti Condorcet adalah contoh potensi universalis emansipatoris yang masih relevan dari proyek pencerahan (hlm 185-186). Kesalahan utama posmodernisme, menurut Wood, adalah kecenderungannya untuk menyamakan modernitas dengan masyarakat borjuis dengan kapitalisme (hlm. 190). Karenanya posmodernisme abai bahwa aspek-aspek destruktif dari 'proyek pencerahan' sesungguhnya berasal dari kapitalisme yang merupakan produk dari epos sejarah tertentu dan bukan seluruh aspek dari Pencerahan dan modernitas (hlm. 190-192).

Kedua, senada dengan Budiman (2013), beberapa fitur dari posmodernisme seperti tendensi anti-sains, perhatian dan keasyikan yang terlampau berlebihan dengan perdebatan semantik dan kemungkinannya memicu sikap asosial di kalangan ilmu sosial humaniora adalah alasan lain bagi kita untuk mengembangkan KAT yang bersifat kritis namun tidak anti-sains, emansipatoris namun juga tidak takut untuk mencoba melakukan analisa seobyektif mungkin dan berani mengeneralisir tanpa abai atas partikularitas empiris, historis, kultural dan geografis.

Ketiga, posisi teoretik yang kami tawarkan juga dimungkinkan dengan berbagai kritik terhadap tendensi anti-sains dan obskurantis dari pendekatan posmodernis dan berbagai turunannya seperti yang dipaparkan oleh Chibber (2013). Secara ringkas, tesis utama dalam kritik karya Chibber terhadap arah perkembangan studi poskolonial dan subaltern dalam kajian Asia Selatan adalah alih-alih memahami “sejarah dari bawah” seperti pemberontakan petani dan kelompok *subaltern* dan dampak modernitas dan kapitalisme dalam partikularitas kulturalnya masing-masing, dua hal tersebut perlu dipahami dalam upaya generalisasi.

Dengan kata lain, kita perlu melihat berbagai fragmen “sejarah dari bawah” seperti studi-studi tentang petani sebagai bagian dari gugusan peristiwa perlawanan dan aspirasi yang universal yang juga berkaitan dengan berbagai upaya perlawanan kaum buruh dan petani di Barat misalnya dan dampak kapitalisme di berbagai belahan dunia sebagai tendensi universalisasi dari kapital (*universalizing tendency of capital*) meskipun tendensi tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang berbeda di berbagai tempat, tentunya tanpa harus dalam bias eurosentris dan orientalis.

Pada akhirnya, tawaran teoretik kami untuk KAT menjadi suatu alternatif yang dapat dipertimbangkan jika dibandingkan dengan dua pilihan sebelumnya: antara abai dengan konteks historis dan relasi kuasa yang terdapat dalam disiplin pengetahuan termasuk KAT atau meneruskan kecenderungan anti-kausalitas dan anti-sains yang ekstrim—keduanya berujung kepada kesia-siaan dari seluruh upaya ilmu sosial humaniora termasuk KAT yang telah dibangun selama ini. Lagipula, tawaran teoretik kami bukanlah sekedar wacana: sekelompok ilmuwan politik muda pengkaji KAT misalnya (Kuhonta, et al., 2008), telah menghasilkan satu volume bunga rampai tulisan yang menunjukkan bahwa upaya teoretisasi dan generalisasi dalam ilmu politik yang diilhami oleh pengetahuan dan sensitivitas tentang Asia Tenggara sebagai suatu kawasan adalah hal yang mungkin. Dalam konteks paradigma ilmu sosial, posisi teoretik ini juga dilegitimasi oleh Flyvbjerg (2001) yang memberikan landasan epistemologis untuk dalil keilmiah ilmu sosial yang tidak kurang daya emansipatorisnya yang dia sebut sebagai paradigma *phronetik*.²⁰

²⁰ Istilah paradigma *phronetik* yang dipakai oleh Flyvbjerg berasal dari istilah *phronesis* yang

Masa Depan KAT di Indonesia

Namun demikian, satu pertanyaan besar belum terjawab: bagaimana dengan nasib dan masa depan KAT di Asia Tenggara itu sendiri, terutama di negara-negara berkembang di Asia Tenggara khususnya Indonesia? Secara historis, Belanda dapat dibilang sebagai salah satu penjajah yang paling enggan memperkenalkan modernitas ke tanah jajahannya terutama dalam hal pendidikan tinggi khususnya ilmu-ilmu sosial (Cribb, 1999; Heryanto, 2012). Di Filipina, ketika University of the Philippines didirikan tahun 1908, dua dari tiga fakultas yang paling awal dibentuk adalah Fakultas Kebudayaan dan Fakultas Kesenian, sedangkan di Thailand, fakultas kebudayaan dan ilmu-ilmu sosial termasuk fakultas tertua di Chulalongkorn University yang didirikan tahun 1917 dan Thammasat University yang didirikan tahun 1934, mendahului Indonesia yang baru membuat fakultas serupa di tahun 1949 di Universitas Gadjah Mada.

Perkembangan ilmu-ilmu sosial humaniora di masa Orde Baru yang cenderung anti atas segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan pemerintah dan diskursus pembangunannya, seperti teori-teori kritis, analisa kelas dan Marxisme juga turut menghambat pengembangan ilmu sosial dan humaniora (Hadiz & Dhakidae, 2005), termasuk yang berkaitan dengan KAT.

Selain preseden historis ini, ironisnya lagi, Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu objek kajian utama dalam KAT dan sedang giat-giatnya mengembangkan pendidikan tingginya justru agak ketinggalan dalam pengembangan KAT. Setidaknya ada beberapa alasan tambahan yang dapat menjelaskan ironi ini, yaitu kesenjangan ekonomi-politik dalam proses produksi pengetahuan tentang Asia Tenggara antara Indonesia dan pusat-pusat KAT di negara maju. Selain itu, naiknya anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi yang tidak disertai dengan naiknya kemampuan pengelolaan dana, administrasi dan sumber daya manusia, pengembangan KAT yang masih terhambat di berbagai perguruan tinggi Indonesia baik dalam dimensi teoretik maupun administrasi.

Pertama-tama, kesenjangan ekonomi-politik dalam proses produksi pengetahuan antara pusat-pusat KAT di negara maju dan di Indonesia belum bisa diminimalisir sepenuhnya. Memang dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana telah dijelaskan di atas terdapat pergeseran kekuatan KAT dari Amerika Utara ke Asia-Pasifik. Namun, pergeseran ini masih terbatas pada kawasan-kawasan maju di Asia-Pasifik, yaitu Australia, Singapura, dan Jepang. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa basis 'ekonomi-politik' dari pengembangan KAT di Indonesia masih terbatas. Berbagai persoalan klasik, mulai dari kurangnya pendanaan, kondisi administrasi dan iklim akademik

berasal dari Aristoteles, yang secara singkat dapat diterjemahkan sebagai sebuah bangunan ilmu yang mencoba 'mendekati' kebenaran atau obyektivitas sebagai pedoman yang dapat dipakai untuk aktivitas praksis.

yang kurang mendukung di universitas-universitas di Indonesia untuk melakukan riset terutama yang berkaitan dengan kajian kawasan dan studi-studi humaniora, beban mengajar yang terlalu banyak, akses yang terbatas ke berbagai jurnal dan literatur akademik serta diskursus keilmuan dan komunitas epistemik yang masih berpusat di negara-negara maju. Hingga kurangnya perhatian untuk pengembangan SDM tenaga pengajar dan pengkaji di berbagai universitas dan lembaga riset, adalah sejumlah masalah yang turut berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi-politik aspek produksi pengetahuan tentang KAT di Indonesia.

Kedua, meskipun beberapa tahun terakhir ini telah terjadi kenaikan anggaran untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, kenaikan anggaran ini tidak disertai dengan peningkatan kemampuan pengelolaan dana yang memadai. Sesuai dengan amanat Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.), Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas) (Universitas Padjadjaran, 2003) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008 (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2008) yang mengharuskan pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Direktorat Jenderal Anggaran, n.d.) dalam beberapa tahun terakhir pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dan beberapa instansi lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama menggenjot pendanaan untuk berbagai skema pengembangan pendidikan tinggi, misalnya melalui pemberian beasiswa bagi tenaga pengajar di universitas (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, n.d.; Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 2012).²¹ Masalahnya, kenaikan anggaran dan pemberian beasiswa saja tidak cukup. Dalam konteks produksi pengetahuan KAT, tantangan utama dari kenaikan anggaran dan pengembangan SDM tenaga pengajar dan peneliti ini adalah bagaimana dua hal tersebut tidak hanya dapat meningkatkan mutu dan jumlah publikasi ilmiah tentang Asia Tenggara dari Indonesia tetapi juga dapat mengembangkan iklim riset dan publikasi yang kondusif bagi para pengkaji KAT dan ilmu sosial humaniora pada umumnya di Indonesia. Sebagai contoh, dalam jangka waktu dekat, kita sudah harus memikirkan bagaimana agar berbagai disertasi dan karya tulis yang dihasilkan oleh ribuan pelajar dan sarjana Indonesia yang belajar di luar negeri khususnya yang didanai oleh

21 Untuk referensi lihat <http://beasiswa.dikti.go.id/index.php> dan http://www.dikti.go.id/?page_id=2062&lang=id untuk beasiswa yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikelola oleh Dikti dan <http://www.lpd.depkeu.go.id/> dan <http://www.beasiswa.lpd.org/> untuk beasiswa yang dikelola secara bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Ini adalah beberapa contoh dari berbagai skema beasiswa yang didanai dan/atau dikelola oleh berbagai institusi pemerintahan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi dan undang-undang tersebut di atas.

Dikti tidak hanya disimpan dan berdebu dalam laci atau sekedar memenuhi rak-rak buku perpustakaan di kampus-kampus luar negeri. Jawaban atas persoalan ini bukan sekedar kenaikan anggaran, melainkan penggunaan anggaran secara tepat.

Ketiga, pengembangan KAT di Indonesia juga masih terbatas oleh persoalan administrasi dan bias teoretik dalam pengembangan keilmuan. Dari segi administrasi, pengembangan KAT secara serius sebagai satu sub-disiplin atau kajian keilmuan bisa dibilang terlambat, bahkan dibandingkan dengan negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Filipina dan Thailand. Di Filipina misalnya, ada jurnal *Kasarinlan* yang fokus kepada kajian Dunia Ketiga, pembangunan dan ekonomi-politik dan memiliki tradisi yang cukup panjang (*Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, n.d.),²² sedangkan di Thailand²³ beberapa universitas seperti Ramkhamhaeng University (*Ramkhamhaeng University*, 2002)²⁴ dan Chulalongkorn University (*ThaiStudiesCenter*, n.d.)²⁵ juga memiliki tradisi Kajian Thailand dan KAT yang cukup panjang. Tentu saja kami tidak menolak fakta bahwa berbagai fakultas ilmu sosial dan humaniora di seluruh Indonesia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang sedikit banyak berhubungan dengan Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, pertanyaannya adalah, sejauh apa karya-karya ilmiah tersebut menyentuh aspek-aspek teoretik dan perdebatan dalam KAT, sejauh apa iklim akademik di universitas-universitas di Indonesia memungkinkan upaya tersebut dan sejauh apa berbagai karya tersebut dapat berkontribusi bagi praksis sosial yang bersifat emansipatoris? Tak hanya itu, arah pengembangan KAT di Indonesia sepertinya juga dihindangi oleh bias teoretik yang bersifat elitis, yang berfokus kepada isu-isu yang bersifat praktis, dianggap bermanfaat dalam proses penyusunan kebijakan terutama bagi pemerintah, namun bisa jadi berjarak atau bahkan kurang bermanfaat baik bagi pengembangan teoretis KAT maupun bagi masyarakat yang dipelajarinya. Ini dapat kita lihat misalnya dari penekanan pada Kajian ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) di beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin dan Universitas Bina Nusantara alih-alih pada KAT yang berpusat pada kawasan Asia Tenggara dan bersifat interdisipliner (*Journal of ASEAN Studies*, n.d.; Muryanto, 2013). Beberapa universitas seperti Universitas Gadjah Mada (Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, n.d.) dan Universitas Indonesia (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, 2013) misalnya belakangan ini mencoba mengembangkan program KAT secara lebih

22 Lihat <http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan>

23 Untuk kasus Thailand tentu kita juga harus jeli dengan fakta bahwa pihak kerajaan atau monarki di Thailand memiliki kepentingan untuk mengembangkan 'Kajian Thailand' atau KAT untuk mempromosikan paradigma pro-monarki terutama dalam kajian sejarah untuk melanggengkan kekuasaan dan pengaruh politik pihak kerajaan. Untuk referensi lihat Anderson (1978) dan Winichakul (1994).

24 Lihat <http://www.ru.ac.th/thaistudies8th/>

25 Lihat <http://www.arts.chula.ac.th/international/thai/index.htm>

serius, namun perkembangannya dapat dibilang lebih lambat dibandingkan dengan berbagai universitas di beberapa negara Asia Tenggara lain.

Penutup

KAT yang awalnya berkembang sebagai proyek pengetahuan untuk kepentingan kolonialisme kemudian berkembang menjadi wadah akademik bagi karya-karya ilmiah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang dikajinya. Namun ini bukan berarti tanpa masalah. Dari segi internal KAT dihadapkan oleh berbagai masalah sosiologis dari proses produksi pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hubungan antara KAT dan masyarakat yang dikajinya dan posisi KAT yang ambivalen dalam menghadapi berbagai paradigma dalam ilmu sosial-humaniora terutama empirisisme-positivisme dan posmodernisme. Dari segi eksternal KAT dihadapkan oleh masalah minat dan pendanaan yang terus menurun terutama bagi pusat-pusat KAT di Amerika Utara.

Namun, selain tantangan, perkembangan KAT akhir-akhir ini juga memberi kesempatan bagi pengembangan KAT kedepannya. Berbagai kritik kontemporer atas empirisisme-positivisme dan posmodernisme memberikan peluang bagi berbagai kajian kawasan termasuk KAT untuk meredefinisikan diri sebagai kajian yang sensitif terhadap konteks, sejarah dan partikularitas lokal namun tidak alergi terhadap upaya generalisasi dan tetap memiliki daya emansipatoris.

Kemudian, penurunan KAT di Amerika Utara berimplikasi kepada berkembangnya pusat-pusat KAT di negara-negara lain, terutama di Asia-Pasifik. Hal ini juga terjadi bersamaan dengan meningkatnya pendanaan dan kualitas sumber daya manusia untuk pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk untuk ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Terdapat dua pilihan bagi para pengkaji KAT, baik yang asing maupun yang lokal, dalam menghadapi perubahan ini: apakah KAT mau tetap bertahan dengan praktek-praktek keilmuan yang lama dengan segala macam dilema dan keterbatasannya, sebagaimana diungkapkan oleh McVey (1995) atau KAT mencoba melakukan terobosan dengan mempromosikan hubungan yang lebih egaliter antara KAT dan masyarakat yang dikajinya maupun pengkaji KAT asing dan lokal, pengembangan pusat-pusat KAT di luar Amerika Utara terutama pusat-pusat KAT di Asia Tenggara sendiri, pemanfaatan anggaran pendidikan tinggi yang lebih strategis dan “membumikan” KAT dengan memosisikan masyarakat Asia Tenggara sebagai subyek dan bukannya sekedar obyek dari KAT – dengan kata lain bergerak dari narasi menuju teori untuk mewujudkan emansipasi. Apabila KAT sebagai sebuah disiplin akademik dan para pelakunya memilih pilihan kedua, maka bukan hanya KAT perlahan dapat memberikan jawaban bagi pertanyaan yang dirumuskan Heryanto (2007),

“bisakah dan mungkinkah orang-orang Asia Tenggara sendiri melakukan KAT?” tapi juga memberikan jawaban bagi pertanyaan tentang relevansi KAT bagi masyarakat Asia Tenggara itu sendiri. ●

Referensi

- ABC Radio Australia. 2013. *Australia to Establish New Indonesia Studies Centre*. (Online) Available at: <http://www.radioaustralia.net.au/international/2013-10-01/australia-to-establish-new-indonesia-studies-centre/1198544>. (Accessed 16 December 2013).
- Abinales, P. N. & Amoroso, D. J. 2005. *State and Society in the Philippines*. Lanham: Rowan and Littlefield Press .
- Adams, L. L. 2013. The Crisis of US Funding for Area Studies. *NewsNet*, March.
- African Studies Association. 2013. *Coalition for International Education Announces that Further Cuts to Title VI and Fulbright Hays Program Funding are Imminent*. (Online) Available at: <http://www.africanstudies.org/news/83-title-vi-fulbright>. (Accessed 14 September 2013).
- Anderson, B. 1978. Studies of the Thai State: The State of Thai Studies. In: E. Ayal, ed. *The Study of Thailand: Analyses of Knowledge, Approaches, and Prospects in Anthropology, Art, History, Economics, History and Political Science*. Athens: Ohio University Press, pp. 193-247.
- Asia Research Institute, n.d.. *Study Group on Indonesia*. (Online) Available at: http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=336 (Accessed 21 September 2013).
- Asia Research Institute, n.d.. *Vision and Mission*. (Online). Available at: http://www.ari.nus.edu.sg/article_view.asp?id=12 (Accessed 21 September 2013).
- Association for Asian Studies, n.d.. *Threats to Title VI Programs: Information and How You Can Help*. (Online) Available at: <http://www.asian-studies.org/News/Title-VI.htm> (Accessed 14 September 2013).
- Berger, P. L. & Luckmann, T. 1979. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. 2nd ed. Middlesex: Penguin Books.
- Budiman, M. 2013. *Perjalanan Para Intelektual dan Pencarian Kembali Kemanusiaan*. (Online) Available at: http://cdn.salihara.org/media/documents/2013/07/18/m/a/makalah_launching_kalam_online_-_manneke_budiman.pdf (Accessed 19 September 2013).
- Center for Southeast Asian Studies Kyoto University. 2012. *About SEAS*. (Online) Available at: <http://englishkyoto-seas.org/about-sea/> (Accessed 21 September 2013).
- Center for Southeast Asian Studies Kyoto University. 2013. *About*

- Us. (Online) Available at: <http://kyotoreview.org/about-us/> (Accessed 21 September 2013).
- Chibber, V. 2013. *Postcolonial Theory and the Specter of Capital*. London and New York: Verso.
- Christie, J. W. 1995. State Formation in Early Maritime Southeast Asia: A Consideration of the Theories and the Data. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 151(2).
- Cribb, R.. 1999. Nation: Making Indonesia. In: D. Emmerson, ed. *Indonesia Beyond Suharto*. Armonk: Asia Society.
- Curaming, R. A. 2006. Towards a Poststructuralist Southeast Asian Studies?. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 21(1).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, n.d.. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Online) Available at: <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45> (Accessed 21 September 2013).
- Direktorat Jenderal Anggaran, n.d.. *Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2009*. (Online) Available at: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=565>. (Accessed 21 September 2013).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, n.d.. *Announcement*. (Online) Available at: <http://beasiswa.dikti.go.id/index.php> (Accessed 21 September 2013).
- Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2008. *PUTUSAN Nomor 13/PUU-VI/2008*. (Online) Available at: http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_13_2008.pdf (Accessed 21 September 2013).
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. 2013. *Seminar Dinamika Sosial Budaya Pada Masyarakat di Asia Tenggara*. (Online) Available at: http://www.fib.ui.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:seminar-dinamika-sosial-budaya-pada-masyarakat-di-asia-tenggara&catid=1:latest-news&Itemid=28&lang= (Accessed 21 September 2013).
- Farr, J. 1988. Political Science and the Enlightenment of Enthusiasm. *American Political Science Review*, 82(1).
- Farr, J., 1995. Remembering the Revolution: Behavioralism in American Political Science. In: J. Farr, J. S. Dryzek & S. T. Leonard, eds. *Political Science in History: Research Programs and Political Traditions*. New York: Cambridge University Press.
- Flyvbjerg, B. 2001. *Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, M. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Foucault, M. 2003. *Society Must be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975-1976*. New York: Macmillan.

- Giroux, H. A. 2002. Neoliberalism, Corporate Culture, and the Promise of Higher Education: The University as a Democratic Public Sphere. *Harvard Educational Review*, 72(4).
- Guha, R. & Spivak, G. C. 1988. *Selected Subaltern Studies*. New York: Oxford University Press.
- Hadiz, V. R. & Dhakidae, D. 2005. *Social Science and Power in Indonesia*. Jakarta and Singapore: Equinox Publishing and ISEAS .
- Heryanto, A. 2007. Can There Be Southeast Asians in Southeast Asian Studies?. In: L. J. Sears, ed. *Knowing Southeast Asian Subjects*. Seattle and Singapore: University of Washington Press and NUS Press.
- Heryanto, A. 2012. Kata Pengantar: Pendidikan Untuk Perubahan. *IndoPROGRESS*, January.
- Hewitt, P. 1982. Southeast Asian Studies in Cina. *The Australian Journal of Chinese Affairs*, Volume 7, pp. 151-162.
- Honolulu Star Advertiser. 2013. *Senate Committee Approves East-West Center Funding Restoration*. (Online) Available at: <http://www.staradvertiser.com/news/breaking/216959701.html?id=216959701> (Accessed 14 September 2013).
- Horn, R. C. 1975. Moscow's Southeast Asian Offensive. *Asian Affairs*, 2(4).
- Hyland, T. 2012. *Australia Abandon Knowledge of the Neighbours*. (Online) Available at: <http://www.theage.com.au/national/australia-abandons-knowledge-of-the-neighbours-20120505-1y62u.html#ixzz1uCL2AIWV> (Accessed 21 September 2013).
- ICEF Monitor. 2013. *Japan's Ambitious Proposals for Higher Education and Language Sectors*. (Online) Available at: <http://monitor.icef.com/2013/05/japans-ambitious-proposals-for-higher-education-and-language-sectors/> (Accessed 21 September 2013).
- Indonesia Programme. n.d.. *About the Indonesia Programme*. (Online) Available at: http://www.rsis.edu.sg/Indonesia_Prog/about.asp (Accessed 21 September 2013).
- Institute for Southeast Asian Studies, n.d.. *Mission*. (Online) Available at: <http://www.iseas.edu.sg/mission.cfm> (Accessed 21 September 2013).
- Jackson, P. A. 2003. Mapping Poststructuralism's Borders: The Case for Poststructuralist Area Studies. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 18(1).
- Jackson, P. A. 2003. Space, Theory, and Hegemony: The Dual Crises of Asian Area Studies and Cultural Studies. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 18(1).
- Jain, R. & Wu, K. J. 2012. *Federal Funding for Harvard Declines*. (Online) Available at: <http://www.thecrimson.com/article/2012/4/4/centers-decrease-federal-funding/?page=single#>. (Accessed 14 September 2013).

- Journal of ASEAN Studies, n.d.. *Background*. (Online) Available at: <http://ir.binus.ac.id/jas/> (Accessed 21 September 2013).
- Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, n.d.. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*. (Online) Available at: <http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan>. (Accessed 21 September 2013).
- Kendhammer, B. 2012. *The Area Studies Debate in Political Science: Learning How (and How not) to Generalize*. (Online) Available at: <http://vimeo.com/36505367> (Accessed 21 September 2013).
- Kuhn, T. 1970. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Kuhonta, E. M., Slater, D. & Vu, T. 2008. *Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Qualitative Analysis*. Stanford: Stanford University Press.
- Larkin, J. A. 1982. Philippine History Reconsidered: A Socioeconomic Perspective. *American Historical Review*, 87(3).
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. 2012. *Sejarah*. (Online) Available at: <http://www.lpdp.depkeu.go.id/index.php?page=profil-sejarah> (Accessed 21 September 2013).
- Lowe, C. 2007. Recognizing Scholarly Subjects: Collaboration, Area Studies, and the Politics of Nature. In: L. J. Sears, ed. *Knowing Southeast Asian Subjects*. Seattle and Singapore: University of Washington Press and NUS Press.
- McCoy, A. W. 1982. Introduction: The Social History of an Archipelago. In: A. W. McCoy & E. C. De Jesus, eds. *Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- McVey, R. 1995. Change in Continuity in Southeast Asian Studies. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1).
- Mediansky, F. A. 1984. Soviet Strategic Interests in Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*.
- Muryanto, B. 2013. *UGM Establishes ASEAN Study Center*. (Online) Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2013/04/30/ugm-establishes-asean-study-center.html> (Accessed 21 September 2013).
- National Humanities Alliance. 2013. *International Education Programs*. (Online) Available at: <http://www.nhalliance.org/advocacy/funding-priorities/international-education-programs-fy2013.shtml> (Accessed 14 September 2013).
- Network for Southeast Asian Studies, n.d.. *Network for Southeast Asian Studies*. (Online) Available at: <http://cseas.net/en/index.html#About> (Accessed 16 December 2013).
- Ohio University, n.d.. *Welcome to the Asian Studies Program at Ohio University*. (Online) Available at: <http://www.asianstudies.ohio.edu/>

- (Accessed 14 September 2013).
- Pepinsky, T. B. 2011. *An Introduction to the State of Indonesian Political Studies*. (Online) Available at: https://courses.cit.cornell.edu/tp253/docs/politics_introduction.pdf (Accessed 21 September 2013).
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, n.d.. *Profil dan Kontak*. (Online) Available at: <http://www.pssat.ugm.ac.id/index.php/id/tentang-pssat/profil-dan-kontak> (Accessed 21 September 2013).
- Ramkhamhaeng University. 2002. *Call for Papers Thai Studies VIII*. (Online) Available at: <http://www.ru.ac.th/thaistudies8th/> (Accessed 21 September 2013).
- S. Rajaratnam School of International Studies, n.d.. *Introduction*. (Online) Available at: http://www.rsis.edu.sg/about_rsis/rsis_objective.html (Accessed 21 September 2013).
- Said, E. 1979. *Orientalism*. New York, NY: Vintage Books.
- Sewell, J. W. H., 2005. *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*. Chicago: University of Chicago Press.
- Spivak, G. C., 1988. Can the Subaltern Speak?. In: C. Nelson & L. Grossberg, eds. *Marxism and the Interpretation of Culture*. Basingstoke: Macmillan Education, pp. 66-111.
- Tempo. 2011. Angin Muram dari Eropa. *Tempo*, 20 November, pp. 97-115.
- Thai Studies Center, n.d.. *Overview*. (Online) Available at: <http://www.arts.chula.ac.th/international/thai/index.htm> (Accessed 21 September 2013).
- Thompson, E. P. 1964. *The Making of the English Working Class*. New York: Pantheon Books.
- Thum, P. 2012. Southeast Asian Studies as a Form of Power. *The Newsletter*.
- Universitas Padjadjaran. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Online) Available at: <http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/UU20-2003-Sisdiknas.pdf> (Accessed 21 September 2013).
- US Department of Education. 2011. *Title VI Programs: Building a U.S. International Education Infrastructure*. (Online) Available at: <http://www2.ed.gov/about/offices/list/ope/iegps/title-six.html> (Accessed 14 September 2013).
- Winichakul, T. 1994. *Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Winichakul, T. 1994. *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Wood, E. M. 2002. *The Origin of Capitalism: A Longer View*. London & New York: Verso.
- Yonezawa, A. 2009. The Internationalization of Japanese Higher Education: Policy Debates and Realities. *Nagoya Journal of Higher Education*, 9(13).